



Antara Sejarah Petheng dan Sejarah Wetheng: Mengidentifikasi Objek Sengketa dalam Kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon

Tendi

FUA/Sejarah Peradaban Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

tendy.chaskey@yahoo.co.uk

Abstract: *The conflict that occurred in Keraton Kasepuhan in 2020 was not the first dispute to occur within the palace. However, the 2020 conflict was perhaps the biggest as it affected the life of the Cirebon palace. In that conflict, the term sejarah petheng became an important thing that was always mentioned by the community, because the concept seemed to be used as a weapon to bring down the ruling family. This article seeks to reveal the motives behind the conflict. In this study, the author conducted research using the historical method. From this study, it is known that the background of the Kasepuhan Palace conflict in 2020 is not only about perbawa and the genealogical truth of the ruler, but also based on disputes over palace assets. In other words, the motive behind the conflict is not only petheng history, but also wetheng history because the historical descriptions that are promoted are related to the (satisfaction of) the stomachs of certain individuals or groups alone.*

Keywords: *conflict, kasepuhan, perbawa, petheng history, wetheng history.*

Abstrak: Konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan pada tahun 2020, bukanlah perselisihan pertama yang terjadi di lingkungan istana tersebut. Meski begitu, konflik tahun 2020 mungkin adalah yang terbesar karena turut memengaruhi kehidupan keraton Cirebon. Dalam konflik itu, istilah sejarah *petheng* menjadi hal penting yang selalu disebut-sebutkan oleh masyarakat, karena konsep itu seolah dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan keluarga yang telah berkuasa. Artikel ini berusaha untuk mengungkapkan motif-motif yang ada di belakang konflik tersebut. Dalam kajian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode sejarah. Dari studi ini diketahui bahwa latar belakang terjadinya konflik keraton kasepuhan tahun 2020, bukan hanya tentang *perbawa* dan kebenaran genealogis penguasa, akan tetapi juga dilandasi oleh sengketa aset keraton. Dengan kata lain, motif di belakang konflik bukan hanya sejarah *petheng*, akan tetapi juga sejarah *wetheng* karena uraian sejarah yang digembar-gemborkan berkaitan dengan (kepuasan) perut individu atau kelompok tertentu semata.

Kata kunci: konflik, kasepuhan, perbawa, sejarah petheng, sejarah wetheng.

1. Pendahuluan

Pada pertengahan tahun 2020, Cirebon dikejutkan dengan peristiwa penyegelan ruangan Dalem Arum Keraton Kasepuhan Cirebon oleh salah seorang kerabat keraton yang bernama Raden. H. Rahardjo Djali. Sosok yang mengaku sebagai

keturunan asli Sultan Aloeda ini menyatakan bahwa keraton Kasepuhan saat itu, yang tengah dipimpin oleh Sultan Arief Natadiningrat, telah lama dikuasai oleh tangan keturunan orang asing (atau luar keraton) karena pejabat yang menduduki tahta keraton bukanlah keturunan asli Sultan Aloeda dan silsilahnya tidak terhubung kepada Sunan Maulana Jati (Sunan Gunung Jati) Syarif Hidayatullah. Oleh sebab itu, untuk menempatkan tahta pada jalur genealogi pendirinya kembali, maka Rahardjo melakukan penguncian terhadap pintu keraton sebagai protes agar persoalan itu segera dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan bersama.

Sayangnya, permintaan Rahardjo bertepuk sebelah tangan karena Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (P.R.A.) Arief Natadiningrat sama sekali tidak mengindahkan permintaan Rahardjo, dan malah menyampaikan kepada khalayak luas bahwa pengelolaan Keraton Kasepuhan masih berada di dalam kendalinya sebagai pemimpin kesultanan. Dalam rilis pernyataannya yang beredar tidak lama setelah kejadian penguncian, Sultan Arief menyampaikan bahwa keraton Kasepuhan berada dalam suasana yang kondusif dan kewenangan masih dipegang olehnya. Terkait sosok Rahardjo, ia menyatakan bahwa Rahardjo bukan tokoh yang memiliki hak atas tahta, baik dilihat dari perspektif apapun, entah itu secara adat istiadat, tradisi, ataupun silsilah. Sultan Arief menekankan bahwa Raden Rahardjo bukan tokoh yang berhak atas gelar sultan dan tahta keraton Kasepuhan¹.

Namun belum juga persoalan konflik itu dituntaskan, ternyata Sultan Arief meninggal dunia pada Rabu (22/7/2020), pukul 05.20 WIB. Jenazah Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat kemudian dikebumikan di pemakaman Astana Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, pada Rabu siang. Tepat 40 hari setelah peristiwa tersebut, putera mahkota Pangeran Raja Adipati Luqman Zulkaedin akhirnya resmi *jumeneng* (dinobatkan) menjadi Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan di Bangsal Panembahan, Minggu, 30 Agustus 2020. Luqman *jumeneng* menggantikan almarhum ayahandanya Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat yang wafat pada 22 Juli 2020. Penobatan terhadap Luqman ditandai dengan penyerahan keris yang diklaim sebagai pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Gunungjati, dari Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat yang berperan sebagai *Patih Sepuh* sekaligus pamannya, kepada Luqman Zulkaedin. Kemudian, prosesi itu dilengkapi dengan agenda tambahan yang tidak biasa, berupa penyerahan nasab oleh Al Imam An-Naqib Al Mufassir Al Habib, Prof. Dr. K.H. R. Shohibul Farozi Azmatkhan yang berasal dari *Qobilah Al Hasani & Al Husaini* (Lembaga Peneliti dan Pentashih *Nasab Qobilah Ahlulbayt* Sedunia). Prosesi *jumenengan* tersebut digelar bersamaan dengan tradisi tahlil 40 hari wafatnya Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan².

¹ Brilliant Awal, 'Diklaim Orang Lain, Sultan Arief Natadiningrat Masih Kendalikan Keraton Kasepuhan Cirebon', 2020 <<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35579512/diklaim-orang-lain-sultan-arief-natadiningrat-masih-kendalikan-keraton-kasepuhan-cirebon>>.

² Ani Nunung Aryani, 'Sultan Sepuh XV Cirebon Resmi Jumeneng Dihadiri Raja Se-Indonesia, Ridwan Kamil Ucapkan Selamat', 2020 <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01708551/sultan-sepuh-xv-cirebon-resmi-jumeneng-dihadiri-raja-se-indonesia-ridwan-kamil-ucapkan-selamat>>.

Setelah penobatan sultan yang baru, kondisi keraton Kasepuhan Cirebon tidak lantas membaik. Palsunya, pihak-pihak yang kontra dengan pihak keluarga mendiang Sultan Arief bermunculan menjadi lebih banyak, di samping Raden Rahardjo Djali yang sejak sebelumnya memang telah menyatakan pemikirannya yang berseberangan dengan pihak keluarga mendiang Sultan Sepuh XIV. Kelompok Rahardjo adalah pihak kedua yang berseberangan pandangan dengan kelompok keluarga Luqman Zulkaedin, dan terus menentangnya sampai sekarang. Bahkan setahun lebih setelah wafatnya Sultan Arief, Raden Rahardjo dinobatkan oleh keluarga besarnya sebagai pemimpin baru Keraton Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Aloeda II. Acara *jumenengan* Rahardjo yang dilaksanakan di kompleks Keraton Kasepuhan itu terjadi pada (18/08/2021), tepat satu hari setelah masyarakat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia³.

Pihak ketiga adalah kelompok yang menyebut diri sebagai keturunan Sultan IV Amier Sena yang merasa berhak atas tahta Kasepuhan. Dengan kata lain, jalur silsilah kelompok ini berbeda dengan dua kelompok sebelumnya. Seolah tidak mau kalah, pihak ini juga menggelar *jumenengan* terhadap sosok yang dianggap paling pantas di antara anggota keluarganya, yakni Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha. Ia dilantik sebagai Sultan Keraton Kasepuhan yang baru dengan gelar Pangeran Jayawikarta II, pada Rabu (20/10/2021), di lokasi yang masih termasuk Kawasan Keraton Kasepuhan, yakni Gedong Kepatihan, Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon⁴. Dalam prosesi tersebut, Wisnu menegaskan statusnya sebagai sultan yang sah dengan mengungkapkan bahwa dirinya adalah, "...pewaris (yang) sah dari Pangeran Muhammad Ilen Seminingrat bin Pangeran Pakishaji Seminingrat, nasab dari Pangeran Jayawikarta bin Sultan Sepuh IV Amir Sena Kasultanan Kasepuhan"⁵.

Di samping ketiga kelompok tersebut, muncul kelompok keempat yang dipimpin oleh Raden Heru Rusyamsi. Pihak yang menyebut diri mereka sebagai Santana Kesultanan Cirebon ini turut serta dalam pusaran konflik Keraton Kasepuhan karena menganggap bahwa tokoh yang mereka ajukan lebih pantas dan lebih berhak atas kepemimpinan yang ada di Keraton Kasepuhan. Kelompok ini mengambil jalur silsilah dari pemimpin Kasepuhan yang ketiga, yakni Sultan Sepuh Jaenudin. Seolah turut meramalkan konflik yang sudah bergelora, pihak keempat ini juga turut mendeklarasikan seorang tokoh sebagai pemimpin Keraton Kasepuhan. Dalam acara yang diselenggarakan pada Senin (27/12/2021) siang di Masjid At-Tin Komplek Wisata Sidomba, Desa Peusing Kecamatan Jalaksana, Kabupaten

³ Sudirman Wamad, 'Diwarnai Berebut Tahta, Rahardjo Dinobatkan Jadi Sultan Kasepuhan Cirebon', 2021 <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5688701/diwarnai-berebut-tahta-rahardjo-dinobatkan-jadi-sultan-kasepuhan-cirebon>>.

⁴ Ahmad Imam Baehaqi, 'Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon Kini Ada Tiga, Pangeran Wisnu Lesmana Gelar Jumenengan Siang Tadi', 2021 <<https://jabar.tribunnews.com/2021/10/20/sultan-keraton-kasepuhan-cirebon-kini-ada-tiga-pangeran-wisnu-lesmana-gelar-jumenengan-siang-tadi>>.

⁵ Lilis Sri Handayani, 'Keraton Kasepuhan Cirebon Kini Miliki Tiga Sultan', 2021.

Tendi

Kuningan, kelompok ini menobatkan Raden Heru Rusyamsi (atau Pangeran Kuda Putih) sebagai Sultan Sepuh Jaenudin II Arianatareja ⁶.

Keempat kelompok ini saling bertikai satu sama lain, walaupun ketiga kelompok yang disebutkan terakhir merupakan pihak-pihak yang tampak sefrekuensi karena mereka berupaya melepaskan Keraton Kasepuhan dari pengaruh keluarga Pangeran Luqman Zulkaedin atau mendiang Sultan Arief Natadiningrat. Pertentangan yang terjadi, sudah bukan interaksi disosiatif yang berupa kontravensi (konflik tertutup), melainkan telah berkembang menjadi perselisihan yang sifat konfliknya terbuka. Benturan fisik bahkan telah terjadi beberapa kali, termasuk dalam peristiwa penolakan terhadap *jumenengan* Pangeran Luqman Zulkaedin pada (30/08/2020) dan *jumenengan* Raden Rahardjo Djali pada (18/08/2021). Kericuhan dalam kedua peristiwa tersebut menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang bertikai berusaha memenuhi tujuannya dengan melakukan tindakan fisik atau kekerasan.

Secara sosiologis, pertikaian semacam ini merupakan proses sosial tingkat lanjutan dari kontravensi. Berbeda dengan proses sosial kontravensi yang mana pertentangan dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi, proses sosial yang berupa pertikaian atau konflik telah mengemuka dan tampak jelas secara nyata. Perselisihan itu telah menjadi sangat tajam karena perbedaan yang ada sudah tidak dapat lagi ditolerir sehingga rasa benci, rasa tidak suka, dan amarah, meletup begitu saja lalu mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan tindakan kekerasan, baik itu berupa tindakan saling melukai, menyerang, atau bahkan menghancurkan. Tentunya kejadian di Keraton Kasepuhan yang telah dihiasi kekerasan itu menjadi hal yang patut diperhatikan dengan seksama, mengingat istana itu adalah simbol budaya yang mesti dijaga kelestarian dan kearifannya.

Tujuan yang membuat keempat pihak berkonflik adalah kursi kepemimpinan atas Keraton Kasepuhan. Di balik itu, tentu terdapat motif-motif yang mendorong masing-masing pihak untuk melibatkan diri dalam pusaran konflik tersebut. Secara garis besar, pihak Raden Rahardjo Djali, Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha, dan Raden Heru Rusyamsi, menyampaikan bahwa motif utama mereka adalah meluruskan sejarah dengan menempatkan *trah* Sunan Maulana Jati kembali ke atas kursi kepemimpinan Kesultanan Kasepuhan yang mereka anggap telah diduduki selama beberapa generasi oleh orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki hak atas tahta. *Perbawa* (kewibawaan) keraton, menurut mereka, seharusnya dipegang oleh keturunan yang sah, dan bukan oleh orang yang tidak tersambung secara silsilah. Sementara itu, di sisi yang lain, kubu Pangeran Luqman Zulkaedin menyatakan bahwa mereka memiliki kepentingan untuk menjaga serta melestarikan tinggalan ayah dan kakeknya (Sultan Arief dan Sultan Maulana) yang sebelumnya telah menjadi Sultan di Keraton Kasepuhan.

⁶ Agus. Mustawan, 'Pangeran Kuda Putih Dideklarasikan Di Kuningan', 2021
<<https://kuninganmass.com/pangeran-kuda-putih-dideklarasikan-di-kuningan/>>.

Studi ini berusaha untuk menelisik motif-motif lain, di balik pelbagai motif normatif yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang berselisih dalam *geger tahta Kasepuhan*. Bagaimanapun, motif *perbawa* dan kebenaran garis genealogis, yang dalam hal ini adalah motif yang normatif, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya motif-motif lain yang mungkin saja belum tampak ke permukaan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, penelaahan mendalam terhadap hal-hal lain di dalam konflik terbaru yang terjadi di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon akan dilakukan dalam studi ini, guna menyingkap pelbagai macam aspek kesejarahan yang masih gelap (*petheng*) atau aspek kesejarahan yang hanya didasarkan oleh kepentingan perut (*wetheng*) individu/ kelompok semata.

2. Metode

Dalam studi ini, peneliti memilih pendekatan metode kualitatif yang seringkali disebut juga sebagai pendekatan metode naturalistik. Objek penelitian yang berupa fenomena sosial politik, sukar ditakar dengan pendekatan kuantitatif dan lebih baik diukur dengan pendekatan kualitatif yang hasilnya dapat mengungkapkan sebuah peristiwa secara mendalam (*in depth*). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan menekankan pada cara pengumpulan dan analisis data non-kuantitatif yang mana aktivitas atau kegiatan penelitiannya dikerjakan dalam kondisi yang *natural* (latar alamiah, yang apa adanya). Latar alamiah adalah tempat di mana peneliti paling mungkin menemukan, atau mengungkap, apa yang ingin diketahui tentang fenomena yang diminati. Karakteristik penelitian kualitatif ini sekali lagi mencerminkan dasar-dasar filosofis dari paradigma alternatif⁷. Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Creswell yang mengungkapkan bahwa sebuah penelitian kualitatif dirancang untuk konsisten dengan asumsi-asumsi paradigma kualitatif⁸. Studi ini didefinisikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan pada pembangunan gambaran holistik yang kompleks, dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan dilakukan dalam latar yang alamiah.

Salah satu karakteristik metode kualitatif adalah fokus pemahaman terhadap latar sosial tertentu⁹. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif mendorong agar peneliti untuk berperan secara langsung di dalam latar sosial tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dikerjakan. Hal ini pula yang kemudian menjadikan peneliti atau pengkaji melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan berpartisipasi atau melibatkan dirinya di dalam aktivitas sehari-hari penelitian

⁷ R Maykut, P., & Morehouse, *Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide* (Routledge, 2002).

⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Traditions* (California: SAGE Publications, Inc, 1997).

⁹ Valerie J Janesick, 'The Dance of Qualitative Research Design Metaphor, Methodolaty, and Meaning', in *Handbook of Qualitative Research, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Eds* (Thousand Oaks, CA: SAGE, 1994), pp. 199–208.

tersebut. Sehubungan dengan hal ini, pendekatan metode kualitatif mengadopsi pandangan ontologis yang berkaitan dengan keyakinan perihal realitas yang diakui tidak obyektif karena peneliti tidak hanya bertanya perihal “apa” dalam penelitian, akan tetapi juga bertanya tentang “mengapa” dan “bagaimana” di dalam penelitian tersebut (Harison, 2016: 89). Dengan dua pertanyaan itu, penelitian menjadi lebih mendalam karena mengungkap pelbagai macam hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar pertanyaan “apa”.

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini, didapatkan dengan sejumlah teknik pengumpulan data, seperti: wawancara langsung, observasi (pengamatan), dan studi dokumen. Dalam wawancara, penulis menemui sejumlah tokoh yang terlibat langsung di dalam konflik keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam kegiatan pengamatan atau observasi, peneliti datang secara langsung ke lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tempat penting bagi peristiwa-peristiwa yang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan, terjadi di keraton Kasepuhan, kediaman sejumlah tokoh pelaku, dan beberapa tempat yang menjadi objek milik kesultanan Kasepuhan. Studi dokumentasi juga dilakukan sebagai upaya untuk menambah khazanah pengetahuan yang terkandung di dalam konflik yang terjadi. Data dokumen yang dimaksud adalah data yang berupa pelbagai informasi atau keterangan yang terdapat di dalam pelbagai macam sumber tertulis. Seluruh data yang dihimpun tersebut, merupakan data yang masih mentah dan oleh sebab itu masih harus ditangani dengan kegiatan pengolahan data oleh peneliti ¹⁰.

3. Hasil dan Pembahasan

a) Sekilas Sejarah Kesultanan-Kesultanan Cirebon

Sebelum terpecah menjadi beberapa kesultanan, di Cirebon berdiri satu kekuasaan politik Islam yang dikenal sebagai Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Islam pertama dan ternama yang berada di wilayah Jawa bagian barat. Kekuasaan yang telah eksis sejak abad ke-15 Masehi ini merupakan sebuah kota pelabuhan penting yang terletak di tengah jalur niaga maritim Kepulauan Nusantara. Melalui Cirebon dan beberapa kota pelabuhan lainnya, sejumlah pulau terhubung satu sama lain, baik demi kepentingan ekonomi, budaya, politik, ataupun demi kepentingan lainnya. Meski secara geografis berada di wilayah Jawa bagian barat, Cirebon tidak berada di pusat budaya masyarakat Sunda. Malah, daerah ini berada di tapal batas wilayah budaya Sunda bagian timur yang berbatasan dengan masyarakat yang berbudaya Jawa. Oleh karena itu, Kerajaan Cirebon tumbuh dengan suatu kebudayaan yang khas tersendiri, karena di wilayah ini berkembang budaya hibrida antara budaya Sunda, budaya Jawa, di sisi yang dominan, dengan

¹⁰ T. A. Stewart, *Intellectual Capital* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997).

tambahan pelbagai unsur budaya lainnya yang datang ke Cirebon dan kemudian berkembang sepanjang sejarah di kawasan tersebut.

Kondisi alam merupakan salah satu faktor penentu bagi kecenderungan gerak komunikasi dan mobilisasi masyarakat. Variasi keadaan alamiah topografi wilayah, misalnya, bisa membuat satu kelompok penduduk untuk lebih mudah atau lebih susah dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan kelompok penduduk lainnya (Ayatrohedji, 1979: 6). Tanah yang lapang dan cenderung mendatar di sepanjang pesisir utara Jawa, memudahkan gerak manusia yang hidup di sana untuk mengarah ke barat (wilayah etnis Pasundan) dan timur (wilayah etnis Jawa) secara leluasa. Kondisi itu membuat lokasi Cirebon menjadi sangat strategis karena berada di perbatasan kedua kutub budaya terbesar Pulau Jawa, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan kedua kebudayaan masyarakat tersebut, baik secara antropologis, sosiologis, ekonomi, ataupun politik dan kekuasaan.

Sebagai wilayah strategis dan banyak didatangi oleh pelbagai macam suku bangsa, Cirebon berkembang sebagai masyarakat yang multikultural. Oleh sebab itu ¹¹ memiliki pemahaman bahwa sebenarnya nama Cirebon sebagai sebuah negeri (*Caruban Nagari*) pada masa itu, memiliki landasan pada nama *Caruban* sebagai nama ibukotanya. Menurutnya, akar kata dari nama *Caruban* adalah kata *sarumban* (yang memiliki makna sebagai pusat tempat pencampuran penduduk). Lama-kelamaan, peristilahan tersebut berkembang dari kata *Caruban* yang pada akhirnya mengalami perubahan nama menjadi kata *Carbon*. Pada mulanya, Cirebon memang merupakan sebuah dukuh kecil yang hanya dihuni oleh segelintir orang. Namun setelah Pangeran Walangsungsang datang menetap, daerah itu kemudian berkembang menjadi pemukiman yang lebih besar dan bahkan bertransformasi menjadi sebuah kota pelabuhan penting dalam jalur niaga maritim internasional saat Syarif Hidayatullah (yang masyhur dengan nama Sunan Maulana Jati atau Sunan Gunung Jati) memimpin wilayah tersebut.

Penamaan Cirebon sendiri, didasarkan atas keberkahan faktual bahwa negeri itu berlatarbelakang elemen masyarakat yang bermacam-macam. Demi keberkahan masyarakat dan wilayahnya, daerah tersebut diberi nama *Caruban*, yang artinya campuran. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebutan itu berubah dari kata *Caruban* menjadi kata *Cirebon* ¹². Keragaman masyarakat Cirebon saat itu mendeskripsikan bahwa kondisi masyarakat sangat bervariasi karena para pendatang yang berasal dari pelbagai suku bangsa itu sampai ke Cirebon dengan membawa kebiasaan dan adat, bahasa dan gaya komunikasi, agama dan kepercayaan, profesi mata pencaharian dan cara bertahan hidup, yang semuanya berlainan satu sama lain. Satu-satunya kesamaan yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang berbeda itu adalah keyakinan

¹¹ P.S. Sulendraningrat, *Sejarah Cirebon* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1985).

¹² H. A. Dasuki, *Purwaka Caruban Nagari.*, penerjemah (Indramayu: Pustaka Nasional Sudiam, 1978).

bahwa Cirebon akan memberi kesempatan dan takdir kehidupan yang lebih baik pada mereka.

Kerajaan Cirebon dirintis oleh Pangeran Walangsungsang (1423-1529), yang dalam tradisi keyakinan masyarakat, diketahui sebagai salah seorang keturunan dari penguasa kerajaan Sunda Pajajaran. Ayah Pangeran Walangsungsang adalah Ratu Jayadewata atau dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyi Subanglarang (puteri Ki Gedeng Tapa). Pangeran Walangsungsang memiliki adik yang bernama Nyi Mas Rara Santang. Dari rahim adiknya tersebut, lahir seorang pemuda yang kemudian menjadi penggantinya, yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Maulana Jati. Di samping saudara kandung, Pangeran Walangsungsang juga memiliki adik tiri yang bernama Pangeran Surawisesa. Karena Pangeran Walangsungsang memeluk agama Islam, Sri Baduga Maharaja kemudian menetapkan Pangeran Surawisesa, yang memiliki kepercayaan Jatisunda seperti dirinya, sebagai pengganti kedudukannya di Kerajaan Pajajaran.

Di Cirebon, Pangeran Walangsungsang akhirnya membangun pedukuhan dan menghidupkan gerak ekonomi dengan memberdayakan masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan semakin ramainya geliat ekonomi Cirebon, maka Pangeran Walangsungsang membangun kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Guna mendukung aktivitasnya tersebut, Pangeran Walangsungsang membangun kediaman yang kemudian dikenal sebagai istana atau *Dalem Pakungwati*. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang mendapat pengakuan secara luas sebagai penguasa pertama Kerajaan Cirebon. Dalam Naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari*, diceritakan bahwa Sri Baduga Maharaja selaku penguasa Kerajaan Pajajaran merestui kekuasaan politik yang digenggam oleh Pangeran Walangsungsang, dan bahkan putranya itu dikirim tanda *keprabon* (keprabuan) dari Kerajaan Pajajaran dan dianugerahi gelar penobatan yang sangat terhormat, yakni Tumenggung Sri Mangana¹³.

Selain mengembangkan pemerintahan Cirebon, Tumenggung Sri Mangana juga aktif dalam kegiatan pengembangan Islam. Dari aktivitasnya itu, Cirebon terhubung dengan Demak, yang juga memiliki kecenderungan yang sama karena keduanya merupakan kekuatan politik Islam yang terletak di pesisir utara Jawa. Hubungan diplomatik keduanya menjadi semakin kuat saat Cirebon telah dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Maulana Jati. Raja yang baru itu membuat hubungannya lebih dekat dengan Demak, karena ia menikahkan putra dan putrinya dengan para keturunan dari tokoh penting kerajaan Demak. Cirebon mencapai kejayaannya pada periode pemerintahan Susuhunan Jati, Syarif Hidayatullah. Pelbagai capaian berhasil ditorehkan pada masa

¹³ Atja dan Ayatrohaedi, *Nagarakretabhumi 1.5; Karya Kelompok Kerja Di Bawah Tanggungjawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon* (Bandung, 1986).

kepemimpinannya, sehingga pada masa itu Cirebon menjelma menjadi salah satu kota pelabuhan penting yang memiliki pengaruh dalam ranah politik dan kekuasaan, baik di tingkat lokal, regional, ataupun internasional. Tidak hanya itu, Cirebon juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat, karena daerah itu menjadi salah satu corong Islamisasi ke pelbagai daerah pedalaman yang ada di tanah Pasundan. Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan kedudukannya diganti oleh Tubagus Pase atau Pangeran Fatahillah.

Pangeran Fatahillah tidak lama menahkodai Cirebon, karena pada tahun 1570 ia meninggal dunia. Para pejabat Cirebon saat itu menetapkan Pangeran Emas, yang secara genealogis masih terhubung pada Susuhunan Jati, sebagai suksesor penguasa sebelumnya. Pemimpin Cirebon yang bergelar sebagai Panembahan Ratu ini sangat lama menduduki singgasana, yakni sekitar 79 tahun, dari tahun 1570 sampai 1649. Panembahan Ratu dianggap memiliki kemiripan dengan buyutnya, yakni Sunan Maulana Jati yang dianggap sebagai wali yang teristimewa di Jawa Barat, karena keduanya sama-sama dianggap sebagai sosok yang keramat¹⁴. Meskipun Panembahan Ratu berhasil menjaga integrasi Cirebon, pada beberapa dekade terakhir kepemimpinannya, ia terjepit di antara sejumlah kekuasaan yang bersaing satu sama lain. Di sisi baratnya, terdapat Banten dan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang telah memantapkan kedudukannya sebagai daerah yang kuat. Sedangkan di bagian timurnya, berdiri Mataram yang bahkan sejak era Senopati telah memperlihatkan hegemoninya atas Cirebon.

Pada tahun 1649, Panembahan Ratu wafat dan Pangeran Karim naik menggantikannya sebagai pemimpin Cirebon. Pada masa ini, Cirebon benar-benar berada dalam himpitan kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam memerebutkan pengaruh di Pulau Jawa. Pada masa ini, Cirebon yang sebelumnya adalah negara sederajat dengan Mataram, menjadi jatuh karena dalam perkembangannya Mataram malah menganggapnya sebagai daerah vassal atau negeri bawahan mereka¹⁵. Tidak hanya itu, Pangeran Karim bahkan kemudian ditahan bersama kedua anak tertuanya di Mataram oleh Susuhunan Amangkurat I¹⁶. Peristiwa tersebut tentunya memperjelas keadaan Cirebon di masa itu yang telah mengalami banyak kemunduran apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Pangeran Karim lalu wafat dalam masa pengasingannya di Mataram dan ia memiliki nama anumerta Panembahan Girilaya. Setelah itu, kekuasaan politik secara otomatis di Cirebon mengalami kekosongan. Memang Mataram pernah mengirim Adipati Martadipa sebagai pelaksana harian pemerintahan Cirebon (Sunardjo, 1996: 66), akan tetapi kedudukannya tidak seleluasa para penguasa

¹⁴ Hoesein Djajadiningrat, *Djajadiningrat, Hoesein. 1983. Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten: Sumbangan Bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa* (Jakarta: Djambatan, 1983).

¹⁵ Raden Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Jakarta: W. Versluys NV, 1957).

¹⁶ Edi Suhardi Ekadjati, *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2017).

asli yang memiliki legalitas kekuasaan dari masyarakat. Walaupun begitu, aparat pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing, seperti kegiatan Syahbandar di pelabuhan, senapati di barak militer, penarik pajak di tengah penduduk, administratur kerajaan di istana, dan lain sebagainya.

Kondisi perpolitikan Cirebon berubah drastis pasca kemunduran Mataram di tahun 1677. Kedua putra Panembahan Girilaya yang selamat, berhasil kembali ke Cirebon dan sama-sama dilantik oleh Sultan Ageng Tirtayasa Banten sebagai *dwi* penguasa Cirebon. Saat itu, Pangeran Martawijaya mendapat gelar Sultan Syamsuddin (Sultan *Sěpuh*), sedangkan Pangeran Kartawijaya dianugerahi gelar Sultan Kamaruddin (Badruddin; Sultan *Anom*)¹⁷. Dengan kata lain, kemunculan Keraton Kasepuhan dan Kanoman baru dimulai sejak periode ini. Dalam perkembangannya kemudian, Pangeran Wangsakerta sebagai pangeran berpengaruh ketiga, turut diberi gelar sehingga ia memiliki nama Panembahan Cirebon. Terhitung sejak penganugerahan gelar itu, di Cirebon terdapat tiga kekuasaan, yaitu: 1) Kesultanan Kasepuhan; 2) Kesultanan Kanoman, dan 3) Kepanembahan Cirebon. Meski begitu, jumlah kekuasaan di Cirebon tidak selalu sama dari waktu ke waktu karena terdapat dinamika politik yang memengaruhinya.

Pengaruh Banten tidak cukup lama di Cirebon, karena sejak sekitar tahun 1680an, keagungan Banten terus mengalami degradasi akibat pertikaian yang terjadi di antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang merupakan putra mahkota dari Kesultanan Banten¹⁸. Seiring dengan kemunduran Mataram dan Banten, VOC muncul sebagai satu-satunya kekuatan yang paling berpengaruh di tatar Jawa. Menyadari hal itu, para penguasa Cirebon kemudian mulai menjalin hubungan “persahabatan” dengan maskapai dagang tersebut. Akan tetapi, hubungan diplomatik yang dibangun itu mesti dibayar mahal oleh Cirebon. Pasalnya, sejumlah tuntutan konsekuensi atas pelbagai perjanjian yang dilakukan di antara kedua belah pihak, mendorong Cirebon untuk memiliki sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan kepada Kompeni.

Sultan *Sěpuh* I wafat pada tahun 1697, dan hal itu membuat kedua putra paling berpengaruhnya (yaitu Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya) saling berkompetisi untuk mendapatkan tahta yang ditinggalkan oleh sultan Kasepuhan sebelumnya. Ini adalah konflik pertama yang diketahui di lingkungan keraton Kasepuhan. Perseteruan itu pada akhirnya selesai dengan adanya intervensi dari VOC yang mendudukkan kedua belah pihak ke dalam meja perundingan, yang dikenal sebagai Perjanjian Cirebon dan VOC tahun 1699. Perjanjian antara Cirebon dan VOC, baik yang diselenggarakan pada tahun

¹⁷ Tendi, ‘Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon’, *Socio Historica*, 1.2 (2022).

¹⁸ Tendi, Op.Cit

1681, tahun 1688, ataupun tahun 1699, memperlihatkan kedudukan Cirebon yang masih sederajat dengan VOC. Akan tetapi, sejak berlakunya perjanjian Mataram dan VOC tahun 1705, maka kedudukan Cirebon menjadi inferior karena berada di bawah bayang-bayang Kompeni. Posisi penguasa Cirebon yang ada di bawah pejabat VOC menjadi lebih jelas dalam perjanjian tahun 1752, yang mana ditekankan dalam perjanjian itu bahwa masukan atau “rekomendasi” VOC menjadi hal yang amat penting dalam menentukan penguasa Cirebon ketika para penguasanya tidak memiliki tokoh atau pengganti yang sah dalam melanjutkan kekuasaannya¹⁹.

Sepanjang abad ke-18 Masehi, dinamika politik yang terjadi membuat jumlah kekuasaan di Cirebon naik dan turun. Pada permulaan abad, terdapat empat keluarga yang membentuk kekuasaan Cirebon, yaitu: 1) Keluarga Sultan *Sěpuh* II; 2) Keluarga Sultan Anom; 3) Keluarga Panembahan Cirebon; dan 4) Keluarga Pangeran Aria Cirebon (putra mendiang Sultan *Sěpuh* I). Namun setelah pertengahan abad itu, komposisi kekuasaan tersebut terus mengalami perubahan, karena sejumlah sebab yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut, keluarga Panembahan Cirebon terhapuskan karena tidak adanya keturunan yang dianggap sah melanjutkan kekuasaan. Nasib keluarga Pangeran Aria Cirebon memiliki nasib yang tidak jauh berbeda, karena penerusnya dianggap tidak cakap dan malah meresahkan masyarakat, sehingga akhirnya kekuasaan itu dieleminasi dari daftar keluarga penguasa-penguasa tradisional Cirebon. Praktis, menjelang akhir abad ke-18, kekuasaan yang tersisa di Cirebon tinggal keluarga Kasěpuhan dan Kanoman.

Setelah VOC runtuh tahun 1799, Cirebon berada di bawah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Belanda yang belum stabil. Pada masa-masa kritis dalam sejarah Eropa tersebut, Cirebon berada dalam kewenangan pemerintahan transisi di bawah kekuasaan Prancis-Belanda (1808-11) yang dipimpin Herman W. Daendels, dan kekuasaan Inggris (1811-16) yang dipimpin Thomas Stamford Raffles. Pulau Jawa dibagi oleh Daendels menjadi sembilan wilayah prefektur, yang dalam statusnya setingkat dengan keresidenan. Pelbagai hak dan atau *privilege* para bupati juga direduksi olehnya dengan cara menjadikan mereka sebagai pegawai negara kolonial. Tidak sampai di situ, relasi pemerintah kolonial dan kerajaan lokal juga dirubah oleh Daendels dengan menegaskan bahwa kepentingan pemerintah kolonial adalah prioritas di seluruh negeri (Furnivall, 1976: 64–5; Breman, 1983: 16–7). Bagi wilayah Cirebon dan sekitarnya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels pada proses selanjutnya turut menyebabkan kemerosotan atas kekuasaan tradisional para sultan Cirebon karena status mereka diturunkan dari yang sebelumnya seorang raja yang

¹⁹ Tendi, *Pedoman Suksesi Kepemimpinan Di Kesultanan Cirebon: Menurut Arsip Perjanjian Cirebon Dan VOC 1752* (Jakarta: Perpunas Press, 2023).

berkuasa menjadi pejabat setingkat bupati yang mesti tunduk kepada prefektur dan pemerintah kolonial (Wahid, dkk., 2021: 47).

Pada dekade awal abad ke-19 M, dinamika kekuasaan terjadi di Keraton Kanoman. Sejak abad sebelumnya, putra mahkota yang masyhur dengan nama Pangeran Raja Kanoman, melakukan penentangan terhadap kebijakan VOC dan pemerintah kolonial. Karena dianggap tidak dapat diajak kerjasama dan malah merepotkan kepentingan penjajah, maka Pangeran Raja Kanoman diasingkan ke luar Jawa. Di Kanoman, Sultan Anom yang wafat akhirnya digantikan oleh Pangeran Imamudin. Namun masyarakat ternyata masih sangat mencintai Pangeran Raja Kanoman sehingga mereka melakukan gerakan sosial yang membuat pemerintah kolonial resah dan khawatir. Pada akhirnya, Pangeran Raja Kanoman kembali dipulangkan ke Cirebon guna meredakan amarah rakyat yang telah membara karena menuntut keadilan bagi sang pangeran. Mendapati bahwa Kanoman telah memiliki pemimpin, maka Pangeran Raja Kanoman memilih tinggal dan menyepi di sekitar Gua Sunyaragi. Walaupun pada tahun 1808 telah ditetapkan bahwa ia memiliki kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Keraton Kacirebon, namun ia tetap hidup sederhana menjauh dari gemerlap kota dan istana. Dengan demikian, sejak abad ke-19 M, Cirebon memiliki tiga keraton, yaitu: 1) Keraton Kasepuhan; 2) Keraton Kanoman; dan 3) Keraton Kacirebonan. Ketiga kekuasaan Cirebon itu lah yang tetap dapat hidup lestari dan terus bertahan melewati zaman sampai sekarang.

b) Memahami Konsep Sejarah *Petheng* dan Sejarah *Wetheng*

Kata "*petheng*" merupakan kata dari Bahasa Jawa yang berarti "gelap". Kata ini merupakan lawan dari kata "*padhang*" yang berarti "terang". Di Cirebon, yang budayanya banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, memiliki pengertian yang sama tentang kata "*petheng*" tersebut. Di kompleks Taman Wisata Gua Sunyaragi yang berlokasi di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, terdapat sebuah gua atau lubang buatan besar yang disebut sebagai goa *petheng* yang artinya adalah gua gelap, merujuk pada kondisi di dalam gua yang memang gelap dan tidak ada cahaya yang masuk ke areal tersebut. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Cirebon juga terbiasa menyebutkan kata *petheng* untuk menjelaskan "keadaan yang gelap" dalam perbincangan atau pembicaraan sehari-hari.

Sedangkan sejarah adalah hasil rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dicatat dan dituliskan berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang dilandasi oleh bukti-bukti yang terverifikasi. Dalam konteks ini, sejarah adalah perubahan karena peristiwa masa lalu dan masa kini tentu tidak akan sama mengingat peristiwa atau kejadian akan selalu berbeda antara satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu. Sejarah tidak hanya berbicara tentang individu yang dituliskan dengan rapi dan teratur, sebab sejarah adalah informasi komunal yang terkadang diungkapkan secara lisan berdasarkan tradisi yang ada.

Sehubungan dengan hal ini, sejarah dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk deskripsi atas pengalaman kolektif dan disampaikan dengan tradisi tutur yang diturunkan secara turun temurun.

Ketika kata sejarah dan kata *petheng* disandingkan membentuk sebuah kata baru, maka kata itu akan memiliki arti yang lebih kompleks. Karena sejarah *petheng* berarti sejarah gelap, atau sejarah yang belum terungkap atau belum diketahui bagaimana alur cerita peristiwanya. Berkaca pada naskah Sejarah Peteng Sejarah Rante Martabat Tembung Wali yang diterjemahkannya, Zaedin mengungkapkan bahwa sejarah *peteng* adalah sejarah yang terkubur sehingga tidak diketahui. Dari naskah tersebut, ia menyatakan bahwa rangkaian sejarah yang telah terjadi dari masa para wali hingga masa Kompeni, tidak semuanya terdeskripsikan dengan baik, karena masih banyak peristiwa yang masih belum dituliskan sehingga kejadian itu tidak diketahui oleh orang banyak dan bahkan siapapun. Dengan demikian, sejarah *petheng* atau sejarah gelap atau sejarah kelam, dapat dimaknai sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu yang masih belum terungkap karena pelbagai sebab, pada masa sekarang.

Di Amerika, terdapat *podcast* sejarah yang bernama *Dark History* dan telah dirilis sejak tahun 2021. Nama siniar itu memiliki pengertian yang sama dengan pengertian sejarah *petheng* karena secara harfiah berarti sejarah gelap. Program yang dipandu oleh penata rias profesional dan pakar kejahatan sejati, Bailey Sarian, berisi siaran pembahasan perihal sisi-sisi gelap sejarah, baik sejarah yang berupa rahasia tersembunyi dari kisah-kisah terkenal ataupun sejarah yang kurang terkenal di Amerika Serikat dan dunia. Sementara itu, Di Inggris, sejarah *petheng* disebut dengan istilah *dark history*, konsep yang sama dengan apa yang ada di Amerika Serikat. Sebagai wilayah yang beragam dan memiliki masa lalu yang panjang dan luar biasa, di bawah permukaannya Inggris memiliki lapisan sejarah yang kelam yang penuh dengan perbuatan mengerikan, peristiwa mengerikan, kejahatan tercela, dan kisah-kisah aktivitas paranormal dan supernatural yang mengganggu.

Tidak terbukanya kejadian sejarah yang ada pada masa lalu, bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, bergantung pada sebab musabab yang menutupi terjadinya peristiwa tersebut. Sejarah gelap yang disengaja, biasanya berkaitan dengan pembungkaman tertentu oleh pihak yang lebih superior terhadap pihak yang lebih inferior. Pembunuhan manusia oleh penguasa, misalnya, akan berusaha ditutupi oleh pihak-pihak terkait agar nama baiknya tidak jatuh dan dibenci masyarakat. Untuk mendukung tujuan itu, pelbagai bukti yang berkaitan dengan peristiwa itu biasanya dimusnahkan agar jejak peristiwanya benar-benar hilang dalam ingatan dan sejarah masyarakat. Sementara itu, sejarah gelap yang tidak disengaja, pada umumnya disebabkan oleh kealpaan manusia yang tidak merawat bukti-bukti sejarah yang ada dengan

baik. Hal itu akan membuat memori yang terkandung di dalam bukti-bukti tersebut turut hilang dimakan zaman.

Definisi sejarah *petheng* memiliki perbedaan dengan definisi sejarah *wetheng*, karena kata dasar dari pengertian yang terakhir itu adalah *wetheng* yang berarti perut atau bagian tubuh yang berada di antara dada dan panggul (pelvis). Meskipun sejarah *wetheng* secara harfiah berarti sejarah perut, dalam konteks kajian yang dilakukan ini, istilah sejarah *wetheng* merujuk pada kajian atau narasi sejarah yang memiliki kepentingan untuk kepuasan perut sejumlah pihak semata. Kepentingan perut bukanlah sekadar kepentingan guna memenuhi naluri hidup semata, sebab soal perut berkaitan pula dengan hal-hal yang cenderung bermakna ekonomis. Sehubungan dengan hal itu, sejarah *wetheng* memiliki pemahaman yang dekat dengan pemanfaatan kisah sejarah demi kepentingan ekonomis tertentu.

Dalam konteks ini, perlu diuraikan bagaimana tumbuhnya akar konflik yang terjadi agar segala permasalahan yang ada sekarang ini dapat menemui penyelesaian yang terang sehingga ke depannya perselisihan bisa tuntas dan tidak terjadi lagi. Tentu konflik segi empat di antara pihak-pihak yang berselisih di Keraton Kasepuhan itu memiliki asal usul, tidak mungkin pergolakan bisa terjadi apabila tidak ada penyebab konkret yang telah menstimulusnya dengan kuat pada masa-masa sebelumnya. Akar permasalahan yang ditemukan tentu akan menunjukkan bagaimana tipe sejarah yang dikaji di dalam penelitian ini sebenarnya, apakah sejarah yang bersifat *petheng* ataukah justru merupakan bagian dari sejarah *wetheng*.

c) Konflik dalam Sejarah Kesultanan Kasepuhan

Konflik yang terjadi pada tahun 2020, sebenarnya bukanlah konflik yang pertama di lingkungan Keraton Kasepuhan. Peristiwa tersebut adalah perselisihan antara kerabat keraton yang kesekian kalinya terjadi. Pada tahun 1697, Keraton Kasepuhan mengalami konflik kerabatnya yang pertama. Di tahun itu, Sultan *Sěpuh* I Pangeran Martawijaya yang juga dikenal sebagai Sultan Samsuddin, meninggal dunia dan meninggalkan dua pangeran paling berpengaruh di keraton yang saling mengklaim tahta. Kedua pangeran itu adalah Pangeran Jamaludin (Dipati Anom) dan Pangeran Adiwijaya (Aria Cirebon). Dalam perkembangannya, konflik itu dapat diatasi dengan membagi kekuasaan dan kewenangan keraton menjadi dua bagian.

Seiring dengan makin masuknya intervensi VOC ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat keraton Cirebon, semakin banyak pangeran di keraton yang tidak menyukainya. Bagaimanapun, campur tangan Kompeni yang terlalu dalam di lingkungan keraton membuat para bangsawan itu merasa tidak dihargai dan bahkan terinjak-injak harga dirinya. Para *pinangeran* yang mengambil posisi sebagai oposisi VOC itu kemudian melakukan pelbagai

macam cara untuk mencoba menghilangkan pengaruh asing yang ada di keraton, baik dengan cara halus atau bahkan cara yang kasar apabila dibutuhkan. Menyadari kenyataan itu, maka Kompeni melakukan campur tangan terhadap prosesi suksesi kekuasaan yang ada di tengah keraton-keraton Cirebon. Bukti intervensi terhadap hal itu dapat dilihat dalam perjanjian (kontrak) asli yang dibuat antara Pangeran Cheribon, 18 Januari 1752 atau *Origineel contract tusschen de Cheribonsche Princen onderling gesloten 18 Jan. 1752*²⁰.

Dengan adanya intervensi tersebut, kemudian muncul kericuhan di tengah Keraton Kasepuhan. Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji, yang memiliki sikap berlawanan dengan kebijakan tersebut, kemudian tewas akibat terpapar konflik. Walaupun ada naskah yang menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit “gila” yang menyerang kewarasannya, namun banyak yang meyakini bahwa kematiannya adalah pembunuhan yang dihasilkan oleh tipu muslihat pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar tampuk kekuasaan Keraton Kasepuhan tidak dipegang olehnya yang sangat pro aktif menentang Kompeni. Padahal, Sultan Matangaji adalah sosok yang dicintai masyarakat karena ia berhasil menorehkan pelbagai macam capaian seperti memprakarsai pembuatan naskah Pustaka Pakungwati Carbon yang bermanfaat untuk bidang kesejarahan Cirebon²¹, pemugaran kompleks istana Gua Sunyaragi (Anom, Sugiyanti, dan Hasibuan, 1996: 108), dan lain sebagainya.

Kematian Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji menyisakan konflik kekuasaan karena penerusnya ternyata bukanlah tokoh yang dianggap pantas oleh sebagian besar kalangan. Tahta harusnya turun kepada Pangeran Suryanegara yang notabene merupakan adik dari Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji, karena sultan tidak memiliki keturunan laki-laki. Akan tetapi dengan adanya campur tangan penguasa, ternyata tahta malah diberikan kepada sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Sepuh Hasanuddin (bertahta dari 1786 - 1791). Meskipun tokoh ini menyebut dirinya sebagai saudara dari Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji (sehingga bersaudara pula dengan Pangeran Suryanegara), namun sejumlah catatan yang dimiliki oleh keturunan Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji malah mendiskreditkannya. Konflik di era ini memang selesai karena VOC bisa meredam gejolak yang muncul, akan tetapi terus diingat oleh memori kolektif keturunan Kasepuhan yang anti-VOC.

Keraton Kasepuhan Cirebon kembali terjerat konflik saat keraton itu tidak memiliki garis keturunan laki-laki sehingga sultan yang berkuasa kemudian mengambil anak “angkat” sebagai penerus tahtanya. Sultan Kasepuhan yang dimaksud adalah Sultan Sepuh XI Jamaludin Alauda. Menurut pelbagai informasi yang dihimpun, ia memiliki kedekatan dengan Snouck Hurgronje,

²⁰ Tendi, *Pedoman Suksesi Kepemimpinan Di Kesultanan Cirebon: Menurut Arsip Perjanjian Cirebon Dan VOC 1752*.

²¹ Edi S. dan Udang A. Darsa Ekadjati, *Katalog Induk Naskahnaskah Nusantara Jilid 5A Jawa Barat Koleksi Lima Lembaga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

tokoh intelektual Belanda sekaligus penasihat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedekatan hubungan itu, tampak dari surat-surat yang dikirimkan oleh Alauda, dari Cirebon ke Den Haag, Belanda. Di dalam korespondensi tersebut, Sultan Kasepuhan itu malah memanggil Snouck dengan sebutan akrab, "Kanjeng Rama". Menurut tradisi lisan yang beredar, Alauda dipinta oleh Snouck untuk menjadikan salah seorang keturunannya yang bernama Alexander sebagai penggantinya di Keraton Kasepuhan. Walaupun bukti konkret dan otoritatif tentang ini belum dapat ditemukan, akan tetapi pelbagai macam kecenderungan memang mengarah ke sana.

Pemilihan Alexander sebagai suksesor Sultan Sepuh XI Jamaludin Alauda tentunya melahirkan perselisihan di tengah keluarga Keraton Kasepuhan. Walaupun hal itu tidak langsung terjadi, namun pasca berpulangnya Alexander dengan status Sultan Sepuh dan kemudian mewariskan kedudukannya kepada putranya, maka pertikaian itu semakin memanas dan bahkan hingga dibawa ke meja hijau. Dalam persidangan yang berlangsung, Alexander yang telah bergelar Sultan Sepuh XII Alexander Rajaningrat, mengajukan forum *privilegiatum*. Akan tetapi, *privilegiatum* itu ditolak oleh dewan pengadilan karena mereka mengenyampingkan permohonan Alexander yang dianggap kurang memiliki landasan. Dengan kata lain, pengadilan dianggap telah menolak Alexander sebagai sultan Kasepuhan²². Konflik terus bergulir dan tidak kunjung selesai, hingga kemudian Alexander yang wafat digantikan oleh Sultan Sepuh XIII Maulana Pakuningrat. Walaupun tidak dapat diatasi sepenuhnya, Pakuningrat dapat menekan gejala konflik dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap keluarga lawannya. Bahkan, terdapat kesepakatan-kesepakatan pembagian kapital tertentu di antara kedua belah pihak yang berkaitan sehingga konflik yang ada dapat diredam.

Perselisihan tahun 2020 merupakan konflik terakhir yang bisa kita saksikan secara langsung karena terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama atau baru tiga tahun berjalan. Di dalam peristiwa ini, akar konflik atau permasalahan yang utama adalah tahta kasepuhan yang hendak diduduki oleh Lukman Zulkaedin. Terdapat sejumlah pihak yang tidak menyetujuinya menjadi sultan Kasepuhan Cirebon dan berusaha memerebutkannya karena merasa silsilah yang mereka miliki lebih mulia ketimbang silsilah yang dimiliki oleh Lukman Zulkaedin, yang di antaranya adalah: keluarga Raden Rahardjo Djali (yang mengklaim sebagai keturunan Sultan Sepuh XI Jamaludin Alauda), Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha (yang mengaku sebagai *trah* Sultan Sepuh IV Amir Sena), dan Raden Heru Rusyamsi (yang mengatasnamakan keluarga besar keturunan Sultan Sepuh III Jaenudin).

²² Sudirman Wamad, "'Diwarnai Berebut Tahta, Rahardjo Dinobatkan Jadi Sultan Kasepuhan Cirebon', 2021 <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5688701/diwarnai-berebut-tahta-rahardjo-dinobatkan-jadi-sultan-kasepuhan-cirebon>>.

d) Objek Sengketa dalam Konflik Kesultanan Kasepuhan

Secara umum, objek yang dianggap sebagai akar konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang memerebutkan tahta Keraton Kasepuhan adalah *perbawa* (kewibawaan) keraton dan kebenaran garis genealogis. Kedua hal ini acapkali dijadikan sebagai landasan bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan keluarga dan keturunan mendiang Sultan Sepuh Alexander Rajaningrat, untuk memakzulkan keturunan raja Kasepuhan ke sebelas itu, seperti mendiang Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat dan Pangeran Lukman Zulkaedin, dari posisi pemimpin Keraton Kasepuhan Cirebon. Motif *perbawa* dan kejernihan garis keturunan asli Sunan Maulana Jati Syarif Hidayatullah itu, dikemas dalam bentuk uraian historis yang dikenal secara luas sebagai sejarah *petheng* (sejarah gelap atau sejarah kelam).

Narasi historis yang tampak misterius itu tentu menjadi magnet yang kuat untuk menarik banyak orang untuk mendalaminya, sekalipun berita yang terkandung belum dapat dibuktikan keabsahannya. Pelbagai elemen masyarakat, yang merasa memiliki dan bahkan menjadi bagian dari keraton, kemudian turut melakukan desakan agar sejarah yang masih gelap itu segera diterangkan sejelas-jelasnya agar pelbagai konflik yang terjadi dapat dicari solusi atau jalan keluar terbaiknya. Di balik soal *perbawa* (kewibawaan) keraton dan kebenaran garis genealogis, ternyata terdapat hal lain yang juga menjadi bahan rebutan pihak yang bersengketa, yakni pelbagai aset yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan.

Oleh karena itu, untuk menemukan akar permasalahan yang sebenarnya, maka akan diuraikan pelbagai objek yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang berselisih dalam konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon, pada tahun 2020. Adapun objek-objek persengketaan itu adalah sebagai berikut:

1) *Perbawa*

Perbawa adalah daya yang terpancar dari sifat luhur; atau keluhuran. *Perbawa* juga dapat dimaknai sebagai pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan. *Perbawa* dan kewibawaan pada dirinya itu merupakan kekuatan yang muncul dari pengaruh pribadinya. Persoalan tentang derajat seseorang dalam tatanan masyarakat adalah suatu persoalan yang inheren dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia. Tradisi yang bersifat hierarkis itu kemudian malah menjadi semakin kuat berkat proses institusionalisasi yang terjadi dalam bidang agama maupun politik masyarakat. Kehidupan sosial pun terstratifikasikan ke dalam sejumlah susunan kelompok masyarakat yang bersifat vertikal.

Terkait derajat ini, dikenal istilah *perbawa* untuk menyebutkan konsep dan istilah peringkat kebangsawanan di wilayah Cirebon. Dalam sejarah tradisi Cirebon, hal ini sempat menjadi biang permasalahan yang melibatkan para petinggi di internal penguasa Cirebon. Pemilihan Sunan Maulana Jati Syarif

Hidayatullah sebagai pengganti Pangeran Walangsungsang dengan tanpa mempertimbangkan elektabilitas sosok Pangeran Carbon (putra Pangeran Walangsungsang) adalah salah satu contohnya. Ketika itu, garis *pancer* laki-laki sebetulnya ada di Pangeran Carbon, namun tampuk kepemimpinan ternyata jatuh pada Sunan Jati yang merupakan iparnya. Derajat kebangsawanan terkait hal ini pun sempat dipersoalkan, yang lalu mereda karena Pangeran Walangsungsang menjelaskan soal “kepantasan” yang menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan kepemimpinan.

Beratus tahun setelahnya, *perbawa* tetap menjadi suatu hal menarik yang acapkali diperselisihkan. Tidak hanya di kalangan bangsawan atas penguasa, namun hingga ke tingkat ningrat yang lebih bawah statusnya. Di samping tradisi yang telah mendarah daging, pelbagai keuntungan yang dihasilkan dari mulianya *perbawa* seseorang menjadikan hal itu terus diperebutkan. Pada saat Cirebon terbagi menjadi beberapa kekuasaan di tahun 1677, *perbawa* menjadi salah satu komponen penting yang dibahas para pinangeran. Hal itu mutlak dilakukan untuk menentukan siapakah tokoh yang paling pantas untuk menempati sejumlah kedudukan.

Pasca dilantiknya *Ratu Katiga Sanak* yang menandai lahirnya kesultanan-kesultanan, kisruh terkait *perbawa* di antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja. Kondisinya justru malah semakin menjadi. Melihat hal itu, pihak Belanda akhirnya turut mengintervensi dan mengikat Cirebon dalam pelbagai kontrak dan perjanjian agar menyatukan mereka untuk membantu kepentingan VOC dan mengesampingkan perselisihan yang terjadi. Pasca jatuhnya Keraton Kasepuhan ke tangan Kompeni, maka *perbawa* sebagai Sultan Sepuh dianggap telah hilang. Oleh karena itu, Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji melakukan perlawanan agar *perbawa* tetap berada di tangannya dan tidak direbut oleh penjajah asing walau akhirnya gagal.

Oleh karena kekuasaan kolonial yang telah berlangsung begitu lama, dibarengi dengan penguasaan keraton baik secara halus ataupun kasar, maka terpikirkan bagi sejumlah pihak untuk memulihkan kembali *perbawa* keraton yang telah jatuh. Terlebih, penguasa Keraton Kasepuhan yang menduduki tahta dari kepemimpinan Sultan Sepuh XII Alexander Rajaningrat hingga sekarang diduduki oleh cicitnya, dianggap sebagai agen atau bagian dari kolonialisme yang telah hancur oleh gerak kemerdekaan bangsa Indonesia. Keinginan untuk menghidupkan kembali *perbawa* keraton terus diupayakan, termasuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menempatkan *perbawa* secara proporsional, maka secara otomatis derajat pemegang tahta yang dilingkupi *perbawa* akan menempati tempat yang agung.

2) Kebenaran Genealogis

Hubungan genealogis adalah hubungan kekerabatan yang didasari oleh garis keturunan manusia dengan relasi keluarga sedarah. Individu yang ada pada masa kini, dapat berkaitan dengan individu-individu manusia yang berasal dari masa lalu, karena mereka terhubung oleh hubungan keluarga, bisa sebagai putra, ayah, kakek, dan lain sebagainya. Dalam konteks kekuasaan di Cirebon, tokoh historis yang memiliki legitimasi adalah Pangeran Cakrabunana/Walangsungsang dan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Maulana Jati Purba, sehingga siapapun yang menjadi penguasa di wilayah itu akan dirasa lebih sah dan pantas apabila ia merupakan keturunan dari keduanya. Dalam sudut pandang adat dan tradisi, pemimpin Kesultanan Kasepuhan sebagai salah satu kekuasaan yang berpangkal pada kekuasaan kedua tokoh di atas, seharusnya terhubung secara genealogis. Oleh sebab itu, siapapun calon penguasa keraton Cirebon yang tidak berkait nasab atau silsilahnya dengan Sunan Maulana Jati dan Pangeran Cakrabunana, maka ia akan mendapat penolakan karena ia dianggap tidak berhak dan bukan bagian dari keturunan tokoh yang mulia serta berjasa bagi Cirebon.

Punggel atau terputusnya silsilah antara Sultan Kasepuhan dan Sunan Jati, dituduhkan oleh pihak Raden Rahardjo Djali, Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha, dan Raden Heru Rusyamsi, kepada pihak Pangeran Luqman Zulkaedin hingga buyutnya, yang dinyatakan sebagai orang asing (atau luar keraton) dan bukan keturunan asli Sultan Sepuh XI Jamaludin Alauda. Dengan kata lain, nasab atau silsilah Pangeran Luqman Zulkaedin beserta keluarganya tidak terhubung kepada Sunan Maulana Jati (Sunan Gunung Jati) Syarif Hidayatullah. Oleh sebab itu, untuk menempatkan tahta pada jalur genealogi perintis dan pendirinya kembali, maka ketiga pihak penentang keluarga mendiang Sultan Arief Natadiningrat, meminta agar Luqman Zulkaedin beserta keluarganya tidak menduduki tahta dan bisa keluar dari kompleks Keraton Kasepuhan. Mereka dipinta untuk keluar dari keraton karena dianggap bukan bagian dari keturunan Susuhunan Jati Purba, sehingga tidak memiliki legitimasi kekuasaan yang dibutuhkan.

3) Aset Keraton

Sebagai sebuah kekuasaan tradisional yang berdiri selama beberapa abad, Kesultanan Kasepuhan memiliki banyak aset, baik yang tetap ataupun yang bergerak. Walaupun begitu, tidak ada yang tahu pasti berapa keseluruhan nilai ekonomi yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan. Sebab, kejelasan perihal aset atau sumber ekonomi dari kekuasaan tradisional itu masih simpang siur karena tidak ada yang mencatatnya secara rapi. Di ruang-ruang terdalam keraton, memang terdapat banyak tumpukan surat dan keterangan informasi perihal lahan-lahan yang dimiliki oleh Kesultanan Kasepuhan. Akan tetapi, karena tidak

ada yang fokus dalam pengurusannya, tumpukan arsip aset itu tidak tersusun secara sistematis dan tidak pernah diinventarisir secara ketat agar dapat diketahui seberapa besar nilai kapital yang dimiliki oleh keraton. Dengan demikian, terdapat sejumlah berita yang menyebutkan aset Keraton Kasepuhan namun tidak ada sumber atau informan yang memiliki hitungan yang sama karena mereka tidak tepat dalam memberikan nilai asetnya.

Meski demikian, secara garis besar nilai aset terpenting dari Kesultanan Kasepuhan adalah kompleks keraton Kasepuhan yang memiliki luas lebih dari 20 hektar. Di keraton, tinggal pemimpin Kasepuhan yang bergelar Sultan Sepuh, Bersama dengan keluarganya. Dari sana, mereka mengatur dan mengelola keraton untuk tetap melestarikan budaya dan tradisi yang ada di lingkungan Keraton Kasepuhan. Menurut hitungan akademis, total nilai ekonomi yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan pada tahun 2016 adalah senilai Rp 73.591.185.150,-. Jumlah ini didapatkan dari penghitungan yang berdasarkan WTP (*Willingness To Pay*) dengan pendekatan TCM (*Travel Cost Method*) dan CVM (*Contingent Valuation Method*) (Dharmawan, Subiyanto, dan Nugraha, 2016). Keraton Kasepuhan memang menjadi salah satu magnet wisata yang memiliki daya tarik terhadap para pelancong yang berasal dari luar daerah atau bahkan luar negeri untuk datang dan mengunjungi Cirebon. Di samping itu, terdapat banyak situs (budaya dan cagar budaya) milik Keraton Kasepuhan yang tersebar di sejumlah tempat, yang luas dan prospek ekonominya tentu memiliki nilai yang cukup besar, karena situs-situs bersejarah pada umumnya turut menumbuhkan geliat ekonomi di sekitarnya.

Selain kompleks keraton, aset lain yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan adalah lahan-lahan yang tersebar di sejumlah tempat di wilayah Cirebon. Menurut mendiang Sultan Arief pada tahun 2010, Keraton Kasepuhan memiliki lahan sejumlah 337 hektar yang sampai saat itu masih dikuasai oleh Pemerintah Kota Cirebon. Hingga tahun 2010, sudah 50 tahun Keraton Kasepuhan tidak lagi mendapatkan pemasukan kas perbendaharaan dari lahan-lahan tersebut (Ivansyah, 2010). Nilai ekonomis dari lahan-lahan tersebut terbilang tidak sedikit karena dalam konteks Cirebon kontemporer yang sudah maju, lahan-lahan yang berada di tempat strategis akan memiliki nilai yang jauh lebih besar dari lahan yang berada di area yang tidak strategis. Tanah Kasepuhan di area vital Kota Cirebon, acapkali menjadi objek sengketa, seperti halnya tanah milik keraton di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo yang diperebutkan bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kodya Cirebon, atau tanah keraton di salah satu ruas Jalan Sutomo, yang pernah dibawa ke meja hijau dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Cirebon.

Lahan yang berkaitan dengan Keraton Kasepuhan, tidak hanya berlokasi di Kota Cirebon. Banyak di antaranya yang juga terletak di daerah tetangga, seperti misalnya di Kabupaten Cirebon. Dalam *Petitum Premair* perkara gugatan Raden

Raharadjo Djali yang bernomor: 63/Pdt.G/2023/PN Cbn di Pengadilan Negeri (Kota) Cirebon, ditulis sejumlah objek tanah yang diperebutkan, yaitu: a) Sawah jasa (yasa) yang terletak di desa Pegambiran letter C No. 1265 blok Sibodjong, persil 44S II seluas 9.018 *bau*; b) sawah jasa (yasa) yang terletak di desa Pegambiran blok Silikasan, persil 41 S II seluas 8.236 *bau*; c) sawah dan tanah jasa (yasa) yang terletak di desa Bandjarwangunan berupa lahan Letter C No. 435 persil 43 S I seluas 17.160 *Ru*, dan lahan Persil 67 S II seluas 7.194 *Ru*. Satuan ukur dalam perkara ini masih menggunakan satuan ukur yang terbilang tidak populer lagi di zaman sekarang, menandakan bahwa persoalan ini memang sudah terjadi cukup lama. Satuan *bau* (berasal dari kata bahasa Belanda, *bouw* yang artinya Garapan) pada umumnya berukuran antara 7.000 s/d. 7.400 meter persegi. Sementara itu, satuan *Ru* (dikenal pula sebagai satuan ubin atau tumbak) pada umumnya berukuran luas sebesar 14,0625 ($3,75 \times 3,75$) meter persegi. Dengan kata lain, lahan yang diperebutkan dalam perkara ini berjumlah sekitar 63.126.000 meter persegi atau sekitar 1.731 hektar.

Selain aset yang berbentuk lahan, Kesultanan Kasepuhan juga memiliki artefak-artefak bersejarah yang nilainya tidak dapat dihitung dengan nominal uang, karena benda-benda itu begitu berharga. Regalia, manuskrip kuno, arsip bersejarah, pusaka keraton, benda-bendainggalan kuno, dan pelbagai macam peninggalan lainnya, merupakan pelbagai benda yang begitu berharga di keraton Kasepuhan. Banyak yang tidak menyadari bahwa artefak-artefak bersejarah itu adalah benda bersejarah yang memiliki kisah dan bukanlah harta yang bisa diperjualbelikan secara bebas ke khalayak luas, sehingga ada saja yang berusaha memanfaatkannya hanya demi kepentingan ekonomis semata. Sehubungan dengan hal itu, terdapat kasus pencurian atau penggelapan pusaka di Keraton Kasepuhan pada tahun 2011 yang bisa dijadikan contoh. Saat itu, keraton kehilangan sebilah pedang Sultan, sebilah pedang senopati, mata tombak Ki Sarotama dan mata tombak Kinata, yang digelapkan oleh kerabat dari keraton sendiri²³.

4. Kesimpulan

Dari studi ini diketahui bahwa konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon, bukan hanya karena adanya sejarah *petheng* (sejarah gelap) yang terjadi di masa lalu semata, akan tetapi juga terjadi karena adanya motif-motif tertentu yang bisa ditelisik sebagai kepentingan ekonomi. Hal itu merujuk pada kenyataan bahwa konflik yang terjadi ternyata turut pula dilandasi oleh perebutan sejumlah aset yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan, yang mana hal itu lebih terlihat untuk (kepuasan) *wetheng* (perut) semata dan bukan untuk mengikis kelamnya sejarah *petheng* (gelap) yang ada di sekitar Keraton Kasepuhan. Jadi, narasi sejarah yang beredar terkait

²³ Reza. Putra, 'Kerabat Keraton Jadi Tersangka Pencuri Pusaka', 2011 <<https://www.viva.co.id/arsip/240847-ningrat-keraton-jadi-tersangka-pencuri-pusaka>>.

Tendi

persoalan konflik di lingkungan Kesultanan Kasepuhan, bukan semata-mata sejarah gelap (sejarah *petheng*) yang belum terungkap akan tetapi turut pula beredar sejarah yang dibuat hanya untuk kepentingan perut semata (sejarah *wetheng*). Studi ini merupakan kajian rintisan atas konflik yang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan pada tahun 2020 hingga sekarang. Sebagai kajian pembuka, artikel ini terbilang begitu sederhana, dan masih membutuhkan tangan-tangan ahli lain untuk dapat mengkajinya lebih lauh lagi. Semoga saja, walaupun dibuat seadanya, artikel ini dapat mendapatkan tempat dalam kajian sejarah dan hati para pembaca yang memiliki ketertarikan pada sejarah Cirebon.

Referensi

- Aryani, Ani Nunung, 'Sultan Sepuh XV Cirebon Resmi Jumeneng Dihadiri Raja Se-Indonesia, Ridwan Kamil Ucapkan Selamat', 2020 <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01708551/sultan-sepuh-xv-cirebon-resmi-jumeneng-dihadiri-raja-se-indonesia-ridwan-kamil-ucapkan-selamat>>
- Awal, Brilliant, 'Diklaim Orang Lain, Sultan Arief Natadiningrat Masih Kendalikan Keraton Kasepuhan Cirebon', 2020 <<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35579512/diklaim-orang-lain-sultan-arief-natadiningrat-masih-kendalikan-keraton-kasepuhan-cirebon>>
- Ayatrohaedi, Atja dan, *Nagarakretabhumi 1.5; Karya Kelompok Kerja Di Bawah Tanggungjawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon* (Bandung, 1986)
- Baehaqi, Ahmad Imam, 'Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon Kini Ada Tiga, Pangeran Wisnu Lesmana Gelar Jumenengan Siang Tadi', 2021 <<https://jabar.tribunnews.com/2021/10/20/sultan-keraton-kasepuhan-cirebon-kini-ada-tiga-pangeran-wisnu-lesmana-gelar-jumenengan-siang-tadi>>
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Traditions* (California: SAGE Publications, Inc, 1997)
- Dasuki, H. A., *Purwaka Caruban Nagari.*, penerjemah (Indramayu: Pustaka Nasional Sudiam, 1978)
- Djajadiningrat, Hoesein, *Djajadiningrat, Hoesein. 1983. Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten: Sumbangan Bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa* (Jakarta: Djambatan, 1983)
- Ekadjati, Edi S. dan Udang A. Darsa, *Katalog Induk Naskahnaskah Nusantara Jilid 5A Jawa Barat Koleksi Lima Lembaga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Ekadjati, Edi Suhardi, *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2017)
- Handayani, Lilis Sri, 'Keraton Kasepuhan Cirebon Kini Miliki Tiga Sultan', 2021
- Janesick, Valerie J, 'The Dance of Qualitative Research Design Metaphor, Methodolaty, and Meaning', in *Handbook of Qualitative Research*, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Eds (Thousand Oaks, CA: SAGE, 1994), pp. 199-208
- Maykut, P., & Morehouse, R, *Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide* (Routledge, 2002)

Tendi

- Mustawan, Agus., 'Pangeran Kuda Putih Dideklarasikan Di Kuningan', 2021 <<https://kuninganmass.com/pangeran-kuda-putih-dideklarasikan-di-kuningan/>>
- Putra, Reza., 'Kerabat Keraton Jadi Tersangka Pencuri Pusaka', 2011 <<https://www.viva.co.id/arsip/240847-ningrat-keraton-jadi-tersangka-pencuri-pusaka>>
- Stewart, T. A., *Intellectual Capital* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997)
- Sulendraningrat, P.S., *Sejarah Cirebon* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1985)
- Tendi, 'Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon', *Socio Historica*, 1.2 (2022)
- — —, *Pedoman Suksesi Kepemimpinan Di Kesultanan Cirebon: Menurut Arsip Perjanjian Cirebon Dan VOC 1752* (Jakarta: Perpustakaan Press, 2023)
- Tresna, Raden, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Jakarta: W. Versluys NV, 1957)
- Wamad, Sudirman, "'Diwarnai Berebut Tahta, Rahardjo Dinobatkan Jadi Sultan Kasepuhan Cirebon', 2021 <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5688701/diwarnai-berebut-tahta-rahardjo-dinobatkan-jadi-sultan-kasepuhan-cirebon>>
- — —, 'Diwarnai Berebut Tahta, Rahardjo Dinobatkan Jadi Sultan Kasepuhan Cirebon', 2021 <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5688701/diwarnai-berebut-tahta-rahardjo-dinobatkan-jadi-sultan-kasepuhan-cirebon>>